

PENGARUH KOLONIAL TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT CIREBON TAHUN 1752-1830

Oleh: Lisa Susanti, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, lisasusanti1338@gmail.com

Abstrak

Cirebon merupakan kota yang dikenal sebagai kota pelabuhan dengan ekonomi yang maju pada zaman Kesultanan Cirebon. Keberhasilan perdagangan mampu membangkitkan kehidupan sosial ekonomi wilayah ini. Pemerintahan VOC menjadikan kondisi wilayah Cirebon tidak lagi sebagai kota pelabuhan yang murni. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kondisi kota Cirebon pada abad ke-18, perkembangan sosial ekonomi masyarakat Cirebon Tahun 1752-1830, dan dampak yang ditimbulkan atas keterlibatan Kolonial di Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan Selama periode tahun 1752-1830, di wilayah Cirebon terjadi perubahan kehidupan yang signifikan. Letak geografisnya yang berada di pesisir pantai menjadikan Cirebon sebagai kota pelabuhan yang berada dalam jalur sutra. Tahun 1752 VOC mengeluarkan peraturan tentang pergantian Sultan. Peran Sultan yang dulunya sebagai tolak ukur dalam pemerintahan Cirebon menjadi tergeser dan lebih berorientasi ke dalam untuk mengurus budaya dan agama. Pada pemerintahan Hindia Belanda, Cirebon dijadikan sebagai ibukota Karesidenan. Kemudian pada masa Raffles, ia memberlakukan sistem sewa tanah, namun gagal. Kekuasaan kolonial ini memberi dampak untuk rakyat, seperti terjadi bencana kelaparan, penjualan diri, kriminalitas, wabah penyakit, dan pemberontakan.

Kata Kunci: *Sosial ekonomi, Kesultanan Cirebon, Dampaknya.*

THE COLONIAL EFFECT OF SOCIO ECONOMICS OF THE CIREBON COMMUNITY 1752-1830

Abstract

Cirebon is a city known as a port city with an advanced economic level during the Sultanate of Cirebon era. The best achievement of trading is able to arouse the social-economic life of this region. VOC made the territory of Cirebon are no longer as a pure port city. The aims of this thesis are : 1) to understand the condition of Cirebon city in the 18th century, 2) to understand the socio-economic development of Cirebon people in 1752-1830 and 3) to find out the impact of the involvement of Colonial in Cirebon. The method of this thesis is historical method; heuristic, source-critic, interpretation, and historiography. The result shows a significance life change during the 1752-1830 in Cirebon. Its geographical location which on the coast made Cirebon as a port city in the silk road. VOC issued a regulation about the succession of the Sultan in 1752. The role of the Sultan who used to be as a benchmark in the government of Cirebon displaced and became more inward-oriented to take care of culture and religion. Cirebon was a capital city of the Residency in the Dutch East Indies government era. Then, in his period, Raffles imposed a ground rent system, but the system failed. This colonial authority gave impact to the people, such as a famine, self-selling, crime, disease outbreaks, and rebellion.

Key words : socio-economic, the Sultanate of Cirebon, the impact.

PENDAHULUAN

Kota Cirebon secara administratif termasuk wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota ini berada di bagian timur Jawa Barat tepatnya di pantai Laut Jawa. Disebelah barat berbatasan dengan Banjir Kanal, Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Brebes, Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Secara geografis kota ini menghubungkan jalur perekonomian antara Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dilihat dari letak geografisnya yang strategis ini, maka kota Cirebon tumbuh dan berkembang menjadi kota perekonomian sebagai kota pelabuhan, perdagangan, industri, budaya dan pariwisata di Jawa Barat.¹

Cirebon yang letaknya berada di wilayah pesisir mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat Cirebon sendiri. Perekonomian Cirebon didukung oleh ekonomi pesisir yang dihasilkan dari pelabuhan dan ekonomi pasar. Ekonomi pesisir memberikan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat. Sejak masa pertumbuhannya, Cirebon sudah memiliki pelabuhan yang dipakai untuk berdagang dan keluarnya arus barang. Oleh karena itu, Cirebon disebut sebagai kota dagang

atau kota pelabuhan. Cirebon yang kaya akan sumber daya alam menarik perhatian pemerintah kolonial untuk menguasai wilayah ini. Dengan kepentingan ekonomi yang menjadi unsur utamanya sebenarnya dimulai sejak masa VOC yang kemudian berlanjut pada kedatangan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Sejak kedatangan VOC di Cirebon, ia menjadikan Cirebon sebagai wilayah perdagangan, berbeda halnya dengan pemerintah Hindia Belanda yang menjadikan Cirebon sebagai ibukota Karesidenan.² Pada masa Raffles, ia memberlakukan kebijakan sistem sewa tanah, namun sistem ini tidak berhasil di terapkan karena masyarakat masih belum bisa menerima sistem yang baru ini dan masih berpegang pada sistem tradisional (feodal).

Kedatangan VOC di Cirebon mempengaruhi segala kehidupan masyarakat Cirebon, terlebih pula ia berusaha menjadi penguasa dengan melakukan intervensi pada politik kerajaan/keraton. Keikutcampuran VOC dalam urusan pemerintahan kerajaan mengakibatkan peran kerajaan menjadi tergeser. Akibatnya, keraton tidak lagi menampakkan diri sebagai otoritas kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat Cirebon. Para Sultan tidak dapat lagi menjadi pemimpin satu-satunya untuk memerintah rakyat. Posisi

¹ Adeng dkk, *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998), hlm. 9-10.

² A.B. Lopian dan Edi Sedyawati, *Kajian Cirebon dan Kajian Jalur Sutra*, dalam "Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah dan Diskusi Ilmiah", (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), hlm. 4.

kerajaan lebih berorientasi dalam urusan keagamaan, tetapi diawasi oleh Kompeni.

Berpindahnya kekuasaan Sultan ke tangan kompeni mengakibatkan posisi Kesultanan menjadi terpisah dan eksistensinya melemah. Kedudukan Sultan Cirebon tidak lagi menjadi kekuatan yang penting karena digantikan oleh kompeni. Cirebon mengalami permasalahan sosial dan ekonomi pada abad ke-18. Terjadinya bencana kelaparan dan lembaga-lembaga sosial telah dirusak selama abad ke-18. Kondisi tersebut membuat Cirebon menjadi miskin. Pejabat Kompeni dalam abad ke-18 terkenal korup dan serakah. Mereka hanya mementingkan urusan menjadi kaya dalam waktu yang singkat dan kembali lagi ke Belanda dengan gaya hidup yang mewah.

Terjadinya penjualan diri untuk menjadi budak secara besar-besaran, kemudian berakibat pada masyarakat Cirebon dengan terjadinya wabah penyakit dan kelaparan yang menyerang masyarakat Cirebon tahun 1719, 1721, 1729, 1756, 1757, 1773, 1775, 1776, 1792 dan 1812. Hal ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat Cirebon, sehingga masyarakat dalam menjalankan kehidupannya tidak merasa nyaman.³

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu sebagai berikut:

A. Heuristik

³ TIM Yayasan Mitra Budaya Indonesia, *Cirebon*, (Jakarta: Sinar Harapan dengan Kerjasama Yayasan Mitra Budaya Indonesia, 1982), hlm. 55-57.

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan untuk menulis penelitian sejarah.⁴ Dalam mencari sumber sejarah terdapat sumber primer dan sumber sekunder.

B. Kritik Sumber atau Verivikasi

Kritik sumber atau verivikasi merupakan kegiatan melakukan kritik untuk menguji kebenaran dari fakta yang sudah ada. Kritik sejarah terbagi dalam dua macam, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

C. Interpretasi (Penafsiran)

Tahap interpretasi merupakan penafsiran dari seorang sejarawan untuk menentukan fakta-fakta dari data sejarah. Pada tahap ini subjektivitas seorang sejarawan tidak bisa dilepaskan, karena perasaan memihak sering terjadi ketika berusaha menafsirkan sebuah fakta. Menurut Louis Gottschalk, sebuah fakta sejarah atau *historical fact* adalah “jelas bahwa fakta sejarah tidak sama dengan data sejarah atau jejak-jejak sejarah sebagai peristiwa. Jejak-jejak itu hanyalah bahan-bahan untuk menyusun fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah bukanlah fakta sejarah jika tidak dapat kita buktikan kebenarannya dengan bukti-bukti yang cukup”.⁵

D. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi atau penulisan sejarah adalah menuliskan hasil interpretasi menjadi

⁴ Suhartono W Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 31.

⁵ Nugroho Notokusanto, *Dasar-dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Djakarta: TP, 1971), hlm. 22.

kisah sejarah dalam hal lain merekonstruksi peristiwa sejarah yang menjabarkan fakta-fakta obyektif mengenai pokok permasalahan yang akan ditulis menjadi kisah sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI CIREBON PADA ABAD KE-18

Berdasarkan *Purwaka Tjaruban Nagari*⁶, dikatakan bahwa Cirebon Dahulu bernama Tegal Alang-alang yang kemudian disebut dengan Lemah Wungkuk, dan setelah dibangun oleh Raden Walangsungsang diubah namanya menjadi Caruban. Istilah Cirebon dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari yang disusun oleh Pangeran Arya Carbon pada 1720 Masehi, Cirebon asalnya dari kata “Caruban” kemudian “Carbon” dan akhirnya menjadi “Cirebon”. Adapun negeri ini juga disebut sebagai Puser Bumi oleh para Wali Sanga, karena letak negeri ini yang berada di tengah-tengah Djawa Dwipa. Selain itu rakyat Cirebon menyebutnya sebagai Negara Gede yang lama kelamaan disebut *Gerage*, kemudian berubah lagi menjadi *Grage*.⁷

Cirebon dikenal sebagai wilayah yang mempunyai potensi sebagai daerah pelabuhan. Perdagangan di pelabuhan Cirebon begitu ramai dikunjungi oleh para saudagar-saudagar dari Cina bahkan Eropa. Perekonomian yang terjalin sangat berkembang. Cina memegang peranan

besar dalam transaksi perekonomian perdagangan ini terkait dengan jual beli barang dagangan baik dipergunakan oleh masyarakat pedesaan di dalam daerah maupun dalam dunia internasional. Kondisi masyarakat Cirebon berkembang pada waktu kerajaan. Sebelum adanya kolonialisasi dari pihak kolonial, bentuk wilayah Cirebon adalah kerajaan, dengan dikepalai oleh seorang Sultan. Pemerintahan kerajaan ini dipegang oleh 3 keraton. Pada kurun waktu 1649-1667 ketika Panembahan Girilaya berkuasa, wilayah Cirebon meliputi Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.

Kehidupan masyarakat Cirebon meliputi kehidupan di pesisir dan di pedalaman. Masyarakat pesisir dalam pendudukannya sangat beraneka ragam. Nama-nama dari kampung mereka diberikan sesuai dengan ciri kehidupan sosial penduduknya. Kampung-kampung tersebut ada kampung Arab, Kampung Pecinan, Kampung Pekojan, dan Kampung-kampung lainnya. Pada masa itu Keraton Cirebon adalah pusat dari pemerintahan Kerajaan Cirebon. Istana atau keraton dikelilingi oleh tembok kota. Berbeda dengan kehidupan masyarakat biasa di luar keraton yang hanya sebagai golongan biasa, kehidupan di kerajaan mempunyai lapisan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Masyarakat di kerajaan secara hierarki berdasarkan kedudukan/peran seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Penggolongan masyarakat di Kerajaan Cirebon dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Golongan Raja, terdiri atas raja dan keluarganya,

⁶ Penanggung Jawab Sejarah Tjirebon dan Staf Kaprabonan Lemahwungkuk Tjirebon, *Purwaka Tjaruban Nagari*, (Jakarta: Bhratara, 1972), hlm. 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

- b. Golongan elit,
- c. Golongan non-elit,
- d. Golongan budak.⁸

Abad 18 adalah masa-masa yang sulit bagi Cirebon dalam dinamika perkembangan sosial ekonomi sepanjang sejarahnya. Berbagai macam peristiwa yang melanda masyarakat Cirebon telah membuat rakyat tidak bisa mengatur kehidupannya dengan baik. Bencana alam dan bencana yang diciptakan oleh manusia sendiri membuat miskin rakyat Cirebon. Tanah-tanah disewakan kepada orang-orang asing, namun tidak mendapat keuntungan bagi para petani. Ekonomi masyarakat menjadi lemah bahkan sampai-sampai ada masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Kekuasaan para elit politik yang kuat dan juga pangeran serta pengawasan atas lembaga-lembaga desa untuk tanah telah dirusak sepanjang abad 18 ini.⁹

B. PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT CIREBON TAHUN 1752-1830

1. Cirebon Pada Masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC)

Dikenalnya Cirebon sebagai kota pelabuhan berakibat terhadap citra Cirebon dalam dunia luar. Pada awal abad ke-16 perdagangan di Cirebon sudah ramai dan mempunyai hubungan erat dengan Mataram.

⁸ M. Sanggupri Bochari dan Wiwi Kuswiyah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 10.

⁹ TIM Yayasan Mitra Budaya Indonesia, *op.cit*, hlm. 55.

Dibuktikan dari keterangan Tome Pires yang menyatakan bahwa nama syahbandar koloni Cirebon di Upin Malaka ialah Pate Kadir. Dia sangat terkemuka dan mempunyai hubungan baik dengan raja.¹⁰ Setelah berhasil menaklukan Kesultanan Cirebon pada abad ke-17, VOC terus berusaha mengembangkan administrasi politiknya di wilayah ini. Hal itu dilakukan sejalan dengan aktivitas ekonomi perkebunan dan komoditi ekspor lainnya di wilayah pedalaman Cirebon. Birokrasi pemerintahan diperluas, sehingga jumlah pegawai dan pejabat kolonial yang tinggal di kota Cirebon semakin banyak.¹¹

Kehidupan ekonomi perdagangan yang menjadi salah satu pendorong perekonomian masyarakat Cirebon menjadi terpuruk akibat tindakan kompeni atas monopoli perdagangan yang dilakukannya pada berbagai komoditi. Melalui perjanjian dengan para Sultan, kompeni memperoleh hak monopoli ekspor beras, lada, kayu, gula, dan produk-produk lain yang dikehendaki oleh VOC, dan bebas dari pajak ekspor-impor. Kekuasaan VOC di Cirebon secara resmi dimulai atas perjanjian yang di tanda tangani oleh Sultan Sepuh I dengan Pihak VOC pada tanggal 7 Januari 1681. Kekuasaan VOC di pegang oleh *De Heeren Zeventien* (tujuh belas orang pemegang saham).

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imporium Jilid I*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 38.

¹¹ Abdul Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa Depresi Ekonomi, 1930-1940*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 35.

Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) memiliki dua jenis pemegang saham, yang kedua jenis sahamnya dibedakan berdasarkan fungsinya. Ada yang bertugas sebagai mitra yang tidak ikut mengelola (*participanten*), ada juga yang berperan sebagai mitra pelaksana (*bewinhebbers*). Ketentuan tersebut menunjukkan Keunikan, yaitu VOC memberikan tanggungjawab kepada semua pemegang saham. Bukan hanya kepada *participanten* saja, melainkan juga kepada *bewindhebbers* yang terbatas pada modal disetor (biasanya *bewindhebbes* memiliki kewajiban yang tidak terbatas).

Stratifikasi sosial penduduk pribumi di daerah Cirebon pada masa VOC masih tetap sama seperti sebelum dikuasai oleh VOC, yaitu terbagi dalam tiga kelas yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Golongan pertama adalah golongan bangsawan tinggi, orang-orang yang termasuk dalam golongan ini adalah Sultan beserta keluarganya.
2. Golongan kedua adalah golongan bangsawan menengah, termasuk di dalamnya orang-orang seperti para pejabat bawahan sultan, ulama, dan saudagar.
3. Golongan ketiga adalah rakyat.¹²

Penduduk Cirebon bukan hanya dihuni oleh orang-orang Cirebon saja, melainkan terdapat juga orang-orang asing yang mendiami

Cirebon untuk tempat tinggalnya, diantara orang-orang asing tersebut adalah orang-orang Arab dan Cina. Sekitar tahun 1700 sudah terdapat rumah-rumah yang terbuat dari bambu. Bangunan keraton dan rumah orang-orang Belanda dibuat dari batu dan kayu. Tahun 1793 di kota Cirebon menurut data statistik sudah terdapat tujuh buah rumah orang Eropa.¹³

Kehadiran orang asing di Cirebon, tidak menyurutkan interaksi sosial yang terjalin diantara masyarakat Cirebon dengan orang-orang asing tersebut. Hubungan sosial masyarakat Cirebon dengan kompeni tetap berlangsung. Kegiatan yang dilakukan terlihat ketika masyarakat Cirebon diminta melakukan pekerjaan untuk kepentingan kompeni, seperti ketika rakyat pribumi disuruh untuk menanam tarum (nila) dan kopi yang merupakan tanaman wajib. Kompeni mewajibkan penguasa pribumi menyerahkan tenaga kerja rodi untuk kepentingan pemerintah, seperti digunakan dalam perbaikan jalan, pembuatan *loji* (benteng), dan lain-lain.

Hubungan antara rakyat dengan Sultan dan pejabat tinggi kesultanan juga terus berlangsung dan berjalan baik. Dalam pemerintahan tradisional seperti kesultanan, hubungan rakyat dengan penguasa terjalin oleh ikatan *feodal-tradisional* yang telah melembaga menjadi tradisi, sehingga terjadi hubungan "kawula-gusti". Kepemimpinan Sultan cenderung berpola kepemimpinan tunggal yang meliputi aspek-aspek kehidupan masyarakat. Akan tetapi, pada waktu itu posisi para Sultan Cirebon berada pada posisi yang lemah, sebagai

¹² A Sobana Hardjasaputra, *Cirebon Dalam Lima Zaman: Abad Ke-15 hingga Pertengahan Abad Ke-20*, (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 109.

¹³ *Ibid*, hlm. 122.

objek yang berada dalam tekanan dan pengaruh kekuasaan serta pengawasan kompeni. Kondisi ini terjadi ketika tahun 1752, VOC mengeluarkan peraturan untuk pergantian Sultan, sehingga secara politis legitimasi atas kekuasaan Sultan tidak menjadi prioritas utama dalam mengatur kehidupan masyarakat Cirebon.

Pemerintahan VOC di Cirebon telah memberikan pengaruh dalam berbagai segi kehidupan di masyarakat Cirebon. Telah terjadi banyak perubahan akibat intervensi VOC di Cirebon. Kehidupan ekonomi perdagangan yang menjadi salah satu pendorong perekonomian masyarakat Cirebon menjadi terpuruk akibat tindakan Kompeni atas monopoli perdagangan yang dilakukannya pada berbagai komoditi.

Kompeni membangun benteng dekat pelabuhan Cirebon yang diberi nama benteng *Beschermingh*. Benteng ini ditinggali oleh para residen Belanda, selain sebagai pejabat mereka juga adalah seorang pebisnis. Berkembangnya pusat bisnis akibat dibangunnya benteng *Beschermingh*, menjadikan Cirebon lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Kondisi ini memunculkan fenomena baru yang diterima Cirebon sebagai daerah bisnis di sekitar pelabuhan dengan pusatnya di benteng VOC. Dengan munculnya pusat bisnis baru di sekitar pelabuhan Cirebon, maka kota Cirebon lama yang berpusat di keraton semakin jauh dari aktivitas ekonomi perdagangan.

Berkembangnya pusat bisnis di wilayah ini mengakibatkan pendapatan ekonomi masyarakatpun juga bertambah. Hal ini disebabkan karena masyarakat Cirebon dapat

mengembangkan perekonomiannya dengan cara berinvestasi maupun berdagang di daerah bisnis tersebut.¹⁴ Selain sebagai kota pelabuhan, Cirebon juga dikenal sebagai kota yang memproduksi beras dan gula. Karena dilihat dari letak geografisnya, tanah di Cirebon memiliki tingkat kesuburan yang tinggi untuk ditanami tanaman tebu dan tanaman padi.¹⁵ Beras merupakan salah satu komoditi utama yang dimonopli oleh kompeni, terbukti pada abad ke-17 Cirebon menjadi salah satu produsen padi di Pulau Jawa di samping Banten dan Rembang.

Monopoli beras ini sangat merugikan rakyat Cirebon akibat kesewenang-wenangan Kompeni mengeksploitasi beras dengan sangat kejam. Kaum tani dituntut oleh pemerintah kolonial untuk terus menghasilkan barang-barang pertanian yang baik. Tuntutan tersebut berkaitan dengan produksi kaum tani melalui penguasaan atas penggunaan tanah dari pemerintah kolonial. Lahan-lahan yang dijadikan sebagai tempat produksi oleh petani juga dikenakan pajak. Desa-desa secara keseluruhan disewakan terhadap orang Cina yang memungut pajak, menjual candu, dan menguasai tenaga kerja.

Pemerintahan VOC bertahan sampai akhir abad ke-18 dan secara resmi bubar pada tahun 1799, kemudian digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintahan

¹⁴ Susanto Zuhdi, *op.cit*, hlm. 122.

¹⁵ Taufik dan Huddy Husin, "Perubahan Sosial Cirebon 1918-1925", Dalam *Jurnal Studi Sosial*, (Th. 6. No. 1, Mei 2014, 31-36), hlm. 31.

VOC di Cirebon dipimpin oleh beberapa residen, yaitu:

Tabel 1.
Para Kepala Pejabat VOC di Cirebon Tahun 1685-1707

Tahun	Nama Kepala Pejabat VOC
1685	De Koopman Maarten Samson
1688	De Koopman Adriaan Willemsen (Williamszoon)
1689	De Kapiten Willem de Ruiter
1694	De Koopman Cornelis Ring
1697	De Koopman Christian Krijger
1699	De Koopman Lucas Meijer (Meur)
1700	De Luitenant Jacob Palm
1703	De Koopman Jacob Heirmans
1706	De Koopman Jan Coin (Kowijn)
1707	De Koopman Cornelis Jongbloed

Sumber: Nina H. Lubis, *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*, (Bandung: Alqaprint, 2000), hlm. 42.

Pemerintahan kompeni di Cirebon atas Van Hogendrop merupakan pemerintahan yang paling buruk. Penilaian ini dikarenakan kondisi masyarakat Cirebon sangat memprihatinkan.

2. Pemerintahan Hindia Belanda Di Cirebon

Pemerintahan Hindia Belanda yang semula disebut dengan *Bataafsche Republiek* diubah menjadi *Koninkrij Holland* (1806) (Kerajaan Belanda). Untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda, tanggal 18 Januari 1807 Lodewijk Napoleon selaku raja di Belanda mengangkat Herman Willem Daendels

menjadi gubernur Jenderal untuk memerintah di Hindia Belanda.

Daendels menjalankan pemerintahan yang bersifat sentralistis, artinya bahwa Daendels memerintah rakyat secara langsung tanpa perantara Bupati atau Sultan. Di tahun 1808 bupati dan Sultan ditetapkan sebagai pegawai tinggi pemerintah kolonial dan mendapat gaji. Namun demikian, mereka tetap berkuasa di daerah masing-masing. Ia mensejajarkan kedudukan bupati dan Sultan. Cirebon dijadikan sebagai ibu kota Karesidenan.

Pada awal abad XIX Cirebon merupakan kota yang jorok dan dilecehkan sampai dengan awal abad XX citra ini belum berubah. Keadaan Cirebon belum teratur, kotor, becek, penuh lumpur, dan comberan, serta tidak mempunyai saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Akibatnya, setiap tahun ketika musim hujan Cirebon selalu terkena banjir dengan ketinggian mencapai sekitar satu meter dari dalam rumah. Kelancaran aliran sungai sangat tergantung pada pasang-surut air laut. Ketika laut pasang, sampah dan kotoran yang telah terendam air laut masuk ke dalam sungai dan kemudian meimbulkan aroma yang tidak sedap. Sampah dibiarkan menumpuk berhari-hari tanpa ada pembersihan. Tumpukan kotoran yang telah terendam air asin menimbulkan bau tidak sedap. Penduduk sangat terganggu dengan keadaan lingkungan yang seperti itu.

Lingkungan disekitar pantai gersang dan udara terasa lebih panas, sehingga dikalangan masyarakat Cirebon memberikan ungkapan sendiri terhadap Cirebon, yaitu “barangsiapa yang hendak menetap di Cirebon,

hendaknya berkenalan terlebih dahulu dengan panasnya lingkungan Cirebon, jika sudah terbiasa dengan suasana yang seperti itu, barulah diakui sah sebagai penduduk Cirebon”.¹⁶ Kondisi ini sangat menghawatirkan masyarakat.

Daendels mengupayakan reorganisasi untuk memulihkan keadaan Pulau Jawa, termasuk wilayah Cirebon dari kesewenangan VOC. Dalam pelaksanaan reorganisasi pemerintahan di Cirebon, Wilayah administratif Karesidenan Cirebon dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah bagian utara disebut wilayah Kesultanan Cirebon, meliputi daerah Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Gebang. Wilayah tersebut mencakup 12 distrik. Bagian kedua adalah bagian selatan disebut dengan *Cheribonsche Preangerlanden*. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa Sultan berhak menerima sebagian wilayah yang dikuasai oleh Sultan sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah Hindia Belanda, namun jumlah rakyatnya ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Daerahnya yang sudah ditentukan menjadi daerah Kesultanan. Sultan Sepuh memperoleh 80.379 jiwa, Sultan Anom memperoleh 76.622 jiwa, dan Panembahan Cirebon memperoleh 80.250 jiwa.¹⁷

¹⁶ Dhanang Respati Puguh, “ Dari Per Aspera Ad Astra ke Cirebon Baru: Perubahan Citra Kota Cirebon 1930-1950-an”, Dapat dilihat pada 21_Per_Aspera_ad_Astra_(Dhanang_R.).pdf, Diakses pada 3 April 2018, pukul 15.00 WIB.

¹⁷ A Sobana Hardjasaputra, *op.cit*, hlm. 136.

Aktivitas perekonomian Cirebon pada masa kolonial dipusatkan pada sistem ekonomi kolonial yang ditopang oleh sektor pertanian tradisional dan perkebunan modern yang berorientasi ekspor. Pertanian tradisional yang dikembangkan oleh penduduk bersifat subsisten untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sementara pada perkebunan modern dikembangkan oleh pemerintah kolonial dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari hasil pertanian tersebut.

Sebagaimana masyarakat pribumi di Karesidenan Cirebon hidup dari sektor pertanian. Mereka hidup di desa-desa dengan mengandalkan perkebunan untuk menghidupi ekonominya. Tetapi pertanian bukan hanya satu-satunya sumber ekonomi masyarakat di Karesidenan Cirebon, mereka juga mengandalkan perekonomian di luar sektor pertanian seperti di bidang pelayanan, jasa, dan pekerjaan nonpertanian di kalangan penduduk pribumi dan juga perdagangan.¹⁸ Etnis Cina menempati posisi yang paling banyak penduduknya di Cirebon.

Perubahan yang terjadi atas pengaruh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dalam masyarakat Cirebon adalah mulai dikenalkan dan diwajibkan untuk menanam tanaman komoditi perdagangan internasional seperti tebu, kopi, tembakau, dan sebagainya untuk kepentingan ekonomi kolonial, meskipun jenis tanaman ini telah dikenal sebelumnya oleh masyarakat Cirebon pada masa kerajaan

¹⁸ Jayanto, “Industri Gula di Karesidenan Cirebon Tahun 1860-1930 dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *skripsi*, (Yogyakarta: FIS UNY, 2015), hlm. 9

terdahulu oleh masyarakat petani Cirebon. Masuknya kekuasaan kolonial Hindia Belanda kedalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Cirebon, terlihat dalam pengenalan tanaman baru kepada masyarakat. Pada prosesnya tidak hanya sekedar mengenalkan tanaman dengan jenis baru akan tetapi juga memberikan dampak pada pola pertanian penduduk.. tanaman baru tersebut dibudidayakan dalam jumlah yang besar dan area yang luas tanahnya. Setelah hasilnya didapatkan dengan kegiatan panennya, kemudian dijual dan diekspor ke pasar internasional.¹⁹

3. Cirebon di bawah Kekuasaan Inggris (1811-1816)

Tahun 1811 secara resmi pemerintah Inggris menggantikan kekuasaan pemerintah Belanda atas Jawa, terutama di Cirebon. Thomas Stamford Raffles menjadi Gubernur Jenderal untuk memimpin penguasaan di Jawa. Di bawah pemerintahannya, Raffles memberlakukan sistem sewa tanah.²⁰ Pada awal pemerintahannya, Raffles mengikuti kebijakan Daendels, namun Raffles mengubah sebutan *prefectur/landdrostambt* menjadi *residency*. Ia juga memperkenalkan jabatan baru dalam pemerintahan kolonial, yaitu asisten residen.

Raffles memberikan tanah persawahan bebas pajak kepada Sultan, dan memberikan subsidi uang gaji. Penghasilan tunai ini diperlukan untuk mencegah para Sultan melakukan pungutan dari rakyat atau untuk hidup dari upeti rakyat yang diberikan kepada

Sultan. Meskipun sistem sewa tanah selalu menjadi ciri khas dari pemerintahan Inggris, namun sistem ini gagal di terapkan di Cirebon. Pada masa pemerintahan Inggris, ketika keadaan Cirebon berada dalam kondisi penuh heroik, pemerintah Inggris ikut menghalau dan berhasil menundukkan pemberontakan.

4. Peran Keraton dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Cirebon

Setelah penguasaan VOC atas Cirebon telah lama dikuasai, kedudukan Sultan Cirebon menjadi semakin lemah. Hal ini mengakibatkan kehidupan sosial masyarakat kota Cirebon menjadi tidak stabil dan terbengkalai. Sebelumnya, ketika kota Cirebon dipimpin oleh Sultan petani dapat dengan mudah mengatur tanahnya untuk pertanian tanpa adanya gangguan dari pihak kerajaan. Peran kerajaan ini sangat dominan dalam kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat, yaitu dengan memberikan dukungan dan memberi kebebasan untuk para petani mengolah tanahnya. Namun keadaan tersebut berubah ketika Cirebon dibawah kendali kompeni. Petani tidak dengan bebas mengurus tanah pertanian tersebut. Kondisi kelemahan kekuasaan Sultan menjadi salah satu sebab kedudukan kaum petani yang mempunyai tanah cukup kuat dengan hak untuk mewariskan tanah kepada anak-anak mereka, sedangkan di distrik–distrik lain di Jawa tanah petani tidak dikuasai secara ketat.

Sebelum kekuasaan VOC berlaku di Cirebon, kerajaan memegang kendali dalam segala urusan kehidupan masyarakat termasuk ekonomi dan sosial masyarakat Cirebon. Peran kerajaan sangat berpengaruh dan dominan

¹⁹ Taufik dan Huddy, *op.cit*, hlm. 33.

²⁰ *Ibid*, hlm. 39.

dalam urusan pemerintahan dan bisa dikatakan mengalami kemajuan. Keraton yang dibangun tidak semata-mata hanya untuk kehidupan raja sendiri, melainkan memiliki berbagai simbol.

Pada tanggal 2 Februari 1809, dikeluarkan *Reglement op het beheer van de Cheribonsche Landen*, yang dalam isinya menjadikan para Sultan Cirebon sebagai birokrat yang bersubordinasi kepada birokrat Hindia Belanda. Para Sultan benar-benar dianggap sebagai pegawai Kerajaan Belanda dengan pangkat Bupati dan dengan demikian kekuasaan para Sultan hilang. Fungsinya sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh para Bupati yang diangkat oleh Gubernur Jenderal. Dengan demikian, ada 4 kabupaten dalam wilayah bekas Kasultanan-Kasultanan Cirebon, yaitu Cirebon (Cheribon), Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Rumah tangga para Sultan benar-benar diatur oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, termasuk soal tanah milik kaprabon, jumlah pegawai, dan pengiring keluarga Sultan. Kedudukan Sultan hanya berperan dalam urusan keagamaan dan kesenian saja pada waktu itu.

C. DAMPAK KETERLIBATAN KOLONIAL DI CIREBON

Dampak yang ditimbulkan atas intervensi dari kolonial yang menguasai Cirebon, adalah sebagai berikut:

DAMPAK SOSIAL

1. Merabahnya Wabah Penyakit dan Kelaparan di Wilayah Cirebon

Di tengah-tengah kemajuan kebudayaan istana Cirebon pada abad ke-18, rakyat seolah-

olah tidak merasakan kesejahteraan sama sekali dari perubahan kehidupan di Cirebon. Disamping perubahan kebudayaan yang maju, sementara rakyat dilanda bencana kelaparan dan wabah penyakit. Tahun-tahun 1719, 1721, 1756, 1757, 1773, 1775, 1776, 1792, dan 1812 merupakan kehidupan yang sulit bagi masyarakat Cirebon dengan adanya bencana kelaparan dan wabah penyakit yang diderita oleh masyarakat.²¹ Dalam suatu laporan dari tahun 1765 menjelaskan bahwa tidak ada perdagangan antara kaum pribumi, karena mereka menjadi miskin dan bahkan kekayaan mereka dirampas habis oleh kompeni akibat eksploitasi dan bencana alam. Di tahun 1773 dan 1775, di Kota Cirebon setiap hari 50 orang meninggal dunia. Berbagai macam penyakit merambah, seperti halnya, penyakit pes yang tumbuh merajalela di masyarakat sekitar tahun 1853-1855.

2. Terjadinya Kemiskinan dan Kejahatan

Pemerintahan raja-raja dari zaman *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) menjadi sumber kemelaratan dan kekacauan. Terlalu banyak orang-orang yang tidak bekerja. Mereka hidup dari hasil perasan keringat rakyat yang menyebabkan munculnya kegelisahan dan gangguan keamanan. Perubahan terjadi pula pada masa Daendels dan Raffles. Setelah terjadi perubahan-perubahan pada kepemimpinan Daendels dan Raffles di Cirebon, saat itu pula terjadi semacam ancaman revolusi lain. Ditandai dengan keadaan yang tidak stabil, yang oleh orang Belanda disebut kejahatan dan

²¹ Tim yayasan Mitra Budaya Indonesia, *op.cit*, hlm. 57.

kerusuhan telah mengganggu Cirebon sepanjang abad ke-18. Gerombolan-gerombolan perampok atau pemberontak merajalela, sulit untuk membedakan antara politik dan kejahatan yang menghancurkan daerah-daerah Cirebon sampai pada daerah terpencil. Singkatnya, terjadi ketidaktentraman di sana, sehingga masyarakat menjadi risau dan gelisah. Kemudian pada akhirnya di akhir abad ke-18 ketidakpuasan dan kejahatan menemukan titik pusatnya.

3. Menurunnya Kekuasaan Sultan

menurunnya kekuasaan Sultan dimulai ketika VOC melakukan perjanjian dengan pihak kerajaan, pada tanggal 7 Januari 1681. Perjanjian ini merupakan titik awal kekuasaan Sultan mulai melemah. Kemudian berlanjut dengan perjanjian tahun 1752, VOC memberlakukan peraturan tentang pergantian sultan. Hal ini semakin membuat kedudukan Sultan semakin lemah.²²

Kekuasaan Sultan tidak lagi menjadi dominan dalam urusan pemerintahan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kekuasaan Kesultanan bukan lagi menjadi prioritas melainkan lebih berorientasi ke dalam mengatur kesenian, keagamaan, dan kebudayaan. Kesultanan tidak diberi ruang gerak sama sekali oleh pemerintah kolonial untuk menjalankan pemerintahan. Kesultanan tumbuh dengan aturan-aturan yang diikat oleh pemerintah kolonial. Meskipun kehadiran

Sultan tetap ada, namun kepemimpinannya hanya dijadikan sebagai simbol.

4. Kekecewaan Rakyat atas Pengangkatan Putra Mahkota

Suksesi di Kesultanan umumnya berjalan dengan lancar sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom IV (1798-1803), namun ketika pergantian pemerintahan untuk pengangkatan Sultan berikutnya terjadi masalah.²³ Pada tahun 1798 Sultan Kanoman mendahulukan putra kesayangannya yang tidak sah melampaui putra sah nya untuk duduk dalam kursi kepemimpinan Sultan. Hal ini menuai konflik karena Sultan Kanoman telah melanggar tradisi bahwa seorang yang berhak menduduki tahta Sultan adalah pewaris yang sah dari perkawinan, tetapi Sultan Kanoman melanggarnya dengan menaikkan putra tidak sah nya untuk menduduki tahta Sultan.²⁴

Hal ini menjadi perhatian bagi keluarga kerajaan dan sangat menyakitkan bagi hati para bangsawan dan pemuka Cirebon. Mereka sangat terpukul atas keputusan Sultan Kanoman dan menimbulkan pertentangan. Reaksi yang ditimbulkan masyarakat dan para bangsawan kerajaan adalah sebagai rasa empati mereka kepada ahli waris yang sah yang seharusnya menduduki tahta Sultan.

Mereka mengajukan protes atas kejadian ini. bahkan orang-orang dari Kasepuhan ikut mempersoalkan putra yang telah di cabut hak warisnya. Pada kejadian ini titik penentu konflik terletak pada pencabutan

²² H.J. de Graaf, dkk, *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historisitas dan Mitos*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 134.

²³ Yanti, *Keraton-Keraton di Indonesia*, (Jakarta: Ghina Walafafa, 2011), hlm. 105.

²⁴ Tim yayasan Mitra Budaya Indonesia, *op.cit*, hlm. 59.

hak waris antara semua kelas bukan persoalan sah atau tidak sahnya seorang yang duduk menjadi pemimpin.

DAMPAK EKONOMI

1. Perbedaan Ideologi Ekonomi yang di Jalankan Pemerintah Kolonial

Pada periode kolonial, ada dua tipe yang menjadi penetapan kebijakan ekonomi politik saat itu, yaitu politik konservatif²⁵ dan liberal. Kedua sistem ini merupakan sistem yang sama-sama dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut. Sistem politik tersebut sebelumnya sudah diterapkan pada masa VOC, namun terdapat perbedaan berupa sudah adanya usaha yang nampak dari pemerintah Belanda untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi politik, sementara pada masa VOC perubahan-perubahan tersebut belum terlihat atau bahkan tidak ada. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat pada kebijakan yang di terapkan pada masa kepemimpinan Dirk van Hogendorp (1799-1808). Sedangkan untuk Ideologi liberalisme diterapkan oleh Raffles.

2. Pemberontakan Rakyat Cirebon

Selama bertahun-tahun Kompeni menjadi penguasa di Cirebon, sudah banyak terjadi pertentangan dan gangguan stabilitas masyarakat. Rakyat merasakan kesengsaraan akibat perbuatan Kompeni yang kejam. Hal ini

menyebabkan huru-hara dan kekacauan yang berlangsung selama belasan tahun. Puncak meledaknya amarah masyarakat Cirebon terjadi pada tahun 1802 berupa gerakan perlawanan rakyat menentang Belanda beserta kaki tangannya. Sasaran utama dari gerakan perlawanan rakyat Cirebon ialah orang Cina, karena mereka dianggap memeras rakyat.

Ketidakpuasan rakyat Cirebon pada waktu itu mendesak pemimpin pemberontakan untuk segera melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Perlawanan tidak hanya ditujukan untuk pihak kolonial saja, melainkan juga terhadap etnis Cina yang dianggap sebagai kaki tangan kolonial.²⁶ Ketika terjadi kerusuhan di Cirebon yang didasarkan atas pemerasan rakyat oleh orang-orang Cina, disaat itu pulalah pemimpin mengutus kepada Ki Ngabehi Dipamanggala, untuk menghimpun ataupun melindungi rakyat dari para kuwu Cirebon di Kasepuhan dan orang-orang Cina.²⁷ Akibat perlawanan rakyat Cirebon ini orang-orang Cina banyak yang mati terbunuh dan diusir dari daerah Cirebon, misalnya di Palimanan, Lohbener, Darmayu, dan sebagainya.

Rakyat Cirebon melakukan perlawanan terhadap orang Cina, Belanda, dan penguasa kesultanan yang memihak kepada Belanda. Mereka memberontak karena kehidupan ekonominya diganggu dan tenaga rakyat diperas oleh golongan Cina, golongan feodal

²⁵ Nyoman Wijaya, *Kekaisaran Kompeni Kecil: Korupsi, Kolusi, Nepotisme Abad 19*, (Yogyakarta: Yayasan Mahavhira, 2001), hlm. 79.

²⁶ Herni Purnaningsih & Agus Mulyana, "Perlawanan Bagus Rugin: Perang Nasional yang Terlupakan" *Dalam Jurnal Vactum* (Vol. 6, No. 1, April 2017), hlm. 88.

²⁷ Arsip Keraton Kasepuhan Cirebon, *Surat Perjanjian dengan VOC, 1782*.

(kesultanan), dan Belanda. Gerakan perlawanan rakyat pertama ini tidak berhasil dipadamkan oleh Belanda. bahkan dari kehidupan sosial-ekonomi yang semakin buruk ini justru melahirkan kekuatan perlawanan yang lebih besar lagi yang di pimpin oleh Bagus Rangin²⁸. Perjuangan Ki Bagus Rangin beserta pasukannya semakin memperkuat pembuktian bahwa sejak dahulu rakyat Cirebon sangat anti penjajahan dan penindasan, bahkan mampu menghancurkan keangkaramurkaan dalam berbagai bentuk.²⁹

KESIMPULAN

Cirebon dengan kekayaan yang dimilikinya menjadikan Cirebon menjadi wilayah yang subur dan makmur karena dikelola dengan baik. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Cirebon terus mengalami perkembangan. Perubahan yang terjadi diakibatkan oleh adanya kolonialisasi dari VOC yang mulai menancapkan pengaruhnya di Cirebon pada perjanjian 7 Januari 1681. Tahun 1752, VOC mengeluarkan peraturan mengenai pergantian Sultan. VOC mendapatkan hak monopoli impor pakaian, kapas, opium, dan monopoli ekspor, seperti lada, kayu, gula, beras, dan produk lain apapun yang dikehendaki oleh VOC. Selain itu, VOC pun menjadikan Cirebon sebagai kota dagang.

²⁸ Van Der Kemp P.H., *Pemberontakan Cirebon Tahun 1818*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), hlm. 25.

²⁹ T.D. Sudjana, dkk, *Legenda Cirebon: Cerita Tentang Asal-Usul Tokoh Peristiwa*, (Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2006), hlm. 162.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Cirebon berkedudukan sebagai ibukota Karesidenan, ibukota kabupaten, dan sekaligus sebagai ibukota distrik. H.W Daendels menjadi Gubernur Jenderal. Status Sultan diberhentikan dan dijadikan sebagai Bupati yang diberi gaji, sehingga Sultan menerima pensiunan. Pada masa Raffles (1811-1816), menerapkan sistem sewa tanah dengan pajak. Semasa Cirebon berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Keadaan Cirebon bukan semakin membaik malah menjadi terpuruk sampai pada tahun 1830. Residen-residen Cirebon dikenal paling serakah dibandingkan residen-residen Kompeni di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Arsip Keraton Kasepuhan Cirebon, *Surat Perjanjian dengan VOC, 1782*.

Buku

Abdul Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa Depresi Ekonomi, 1930-1940*, Yogyakarta: Ombak, 2009.

Adeng dkk, *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998.

Bochari M Sanggupri dan Wiwi Kuswiyah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hardjasaputra A Sobana, *Cirebon Dalam Lima Zaman: Abad Ke-15 hingga Pertengahan Abad Ke-20*, Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011.

- Lapian A.B. dan Edi Sedyawati, *Kajian Cirebon dan Kajian Jalur Sutra*, dalam “Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah dan Diskusi Ilmiah”, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
- Nina H. Lubis, *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*, Bandung: Alqaprint, 2000. H.J. de Graaf, dkk, *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historisitas dan Mitos*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Nugroho Notosusanto, *Dasar-dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Djakarta: TP, 1971.
- Penanggung Jawab Sejarah Tjirebon dan Staf Kaprabonan Lemahwungkuk Tjirebon, *Purwaka Tjaruban Nagasai*, Djakarta: Bhratara, 1972.
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imporium Jilid I*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sudjana T.D, dkk, *Legenda Cirebon: Cerita Tentang Asal-Usul Tokoh Peristiwa*, Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2006.
- Suhartono W Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- TIM Yayasan Mitra Budaya Indonesia, *Cirebon*, Jakarta: Sinar Harapan dengan Kerjasama Yayasan Mitra Budaya Indonesia, 1982.
- Van Der Kemp P.H., *Pemberontakan Cirebon Tahun 1818*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1979.
- Yanti, *Keraton-Keraton di Indonesia*, Jakarta: Ghina Walafafa, 2011.
- Herni Purnaningsih & Agus Mulyana, “Perlwanan Bagus Rangin: Perang Nasional yang Terlupakan” *Dalam Jurnal Vactum* Vol. 6, No. 1, April 2017.
- Jayanto, “Industri Gula di Karesidenan Cirebon Tahun 1860-1930 dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *skripsi*, Yogyakarta: FIS UNY, 2015.
- Taufik dan Huddy Husin, “Perubahan Sosial Cirebon 1918-1925”, *Dalam Jurnal Studi Sosial*, Th. 6. No. 1, Mei 2014, 31-36.

Profil Singkat

Lisa Susanti, lahir di Cirebon pada tanggal 5 Januari 1995. Menyelesaikan studi tingkat sekolah menengah atas di SMA 1 Sumber lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Negeri Yogyakarta pada Jurusan Ilmu Sejarah.

Artikel, Skripsi dan Jurnal

Dhanang Respati Puguh, “ Dari Per Aspera Ad Astra ke Cirebon Baru: Perubahan Citra Kota Cirebon 1930-1950-an”, Dapat dilihat pada 21_Per_Aspera_ad_Astra_(Dhanang_R.).pdf, Diakses pada 3 April 2018, pukul 15.00 WIB.